

**PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
FAKTOR PENYEBAB SERTA AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DIAH FERAWATI

NIM : C 100 030 266

NIRM : 03.6.106.01000.5.0266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah, kebutuhan phsis maupun psichis yang harus dipenuhi.¹

Pergaulan hidup rumah tangga di bina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Menurut undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci. Perkawinan berakibat terjadinya lembaga keluarga ekonomi terkecil

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1990, hal 1.

dalam hal distribusi kekayaan dan waris disamping merupakan lembaga pendidikan yang dasar, tempat pembentukan watak, kepribadian, keimanan dan ketrampilan tertentu sekaligus tempat meletakkan dasar pertama bagi kesadaran bertanggung jawab. Dengan perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Organisasi keluarga yang dibentuk dengan melalui perkawinan adalah merupakan inti dari organisasi bernegara. Kehidupan yang bahagia tentram dan damai akan dapat menciptakan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah Indonesia merasa perlu mengatur masalah perkawinan dalam perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Untuk itu dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai peraturan pelaksanaannya. Agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut sah, sebelum para pihak melangsungkan perkawinan diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut akan menyebabkan perkawinan tidak sah (batal). Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai
2. Mendapat izin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.

3. Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Antara kedua calon suami istri tidak ada larangan perkawinan.
5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami apabila mendapat izin dari pengadilan.
6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain.
7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan.

Perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing serta dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri dua orang saksi. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari perkawinan yang dilangsungkan itu akan dibuat suatu akta perkawinan yang merupakan alat bukti terjadinya perkawinan tersebut. Akta perkawinan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dirubah atau dicabut tanpa adanya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk itu. Sehingga pentingnya perkawinan itu tidak hanya terletak pada peristiwanya melainkan terletak pada ikatan hukumnya dan akibatnya terhadap keluarga yang merupakan komponen masyarakat.

Di dalam perkawinan tersebut terdapat pula perkara-perkara perkawinan seperti pencegahan perkawinan, perceraian, putusnya perkawinan,

pembatalan perkawinan dan lain sebagainya. Perkara-perkara tersebut timbul karena para pihak yang tersangkut dalam suatu perkawinan itu tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, sehingga berakibat tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia tidak tercapai.

Perkara-perkara perkawinan tersebut harus mendapatkan penyelesaian secara hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi tidak semua badan peradilan berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan. Untuk itu diatur peradilan-peradilan mana saja yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perkawinan itu. Badan peradilan dimaksud adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Menurut peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku pada saat ini, untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan diadakan pembagian wewenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan instansi yang berwenang menangani perkara-perkara perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, sedang Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang menangani masalah-masalah perkawinan dan perceraian bagi mereka yang beragama selain Islam.

Sementara itu mengenai masalah pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan tersebut erat kaitannya dengan ada tidaknya suatu perkawinan antara para pihak, sekalipun para pihak telah hidup bersama, telah mempunyai

keturunan, telah mempunyai harta kekayaan dan lain-lain. Dalam pembatalan perkawinan, pada saat perkawinan itu belum dibatalkan perkawinan tersebut sebenarnya sudah sah. tetapi kemudian terjadi hal-hal yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan itu, seperti wali tidak sah, suami istri adalah saudara sesusuan dan lain sebagainya yang menyebabkan perkawinan itu batal (tidak sah).

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut akta perkawinan harus dicabut. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Menurut Roihan A. Rasyid tujuan beracara di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan.²

Sebelumnya pembatalan perkawinan hanya dianut oleh ajaran agama yang perkawinannya berasaskan monogami tertutup, seperti dikalangan umat Kristen, Katholik dan Budha, sedangkan dalam hukum adat dan agama Islam

² Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 8

yang berasaskan monogami terbuka atau poligami tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Perkawinan yang dianggap tidak baik dan bertentangan dengan adat dan agama, maka bukan diajukan pemohon pembatalan tetapi langsung mengajukan perceraian atau menjatuhkan talak. Yang dimaksud pembatalan perkawinan menurut Soedaryo Saimin, SH yaitu “Perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang.”³

Berdasarkan hal di atas pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan adalah melalui proses-proses yang diatur dalam hukum acara. Untuk Pengadilan Agama dalam hal ini UU No. 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama. Proses tersebut meliputi sejak pendaftaran perkara di kepaniteraan pengadilan sampai pelaksanaan putusan. Dengan adanya proses-proses tersebut maka perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke pengadilan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal di ataslah yang melatar belakangi penulis mengadakan penelitian tentang proses pelaksanaan pembatalan perkawinan dan dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM FAKTOR PENYEBAB SERTA AKIBAT HUKUMNYA (Study Kasus di Pengadilan Agama Klaten).”

³ Soedaryo Saimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 16.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam masalah pembatalan perkawinan, sedangkan kemampuan dan pengertian penulis mengolah masalah dengan baik dan terperinci, penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan pembatasan masalah ini diharapkan permasalahan tidak akan meluas yang pada akhirnya akan menyimpang dari permasalahan yang dibahas dan menyebabkan kaburnya permasalahan yang pokok. Di samping itu dengan adanya pembatasan masalah ini data-data yang diperoleh akan dapat diolah dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hanya akan membatasi pada masalah proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam faktor penyebab serta akibat hukumnya.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam penyusunan skripsi. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki serta dapat memberikan arah pembahasan yang jelas, sehingga terbentuk hubungan-hubungan antara masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten?
3. Akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten?
4. Landasan hukum atau pertimbangan hukum apakah yang dipakai dalam pengambilan putusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten?
5. Permasalahan apa yang timbul dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten dan bagaimana penyelesaiannya?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula kegiatan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini juga tidak lepas tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan
 - b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten.

- d. Untuk mengetahui landasan hukum yang dipakai Pengadilan Agama Klaten di dalam pengambilan keputusan dalam perkara pembatalan perkawinan.
- e. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Klaten dan penyelesaiannya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data guna menyusun skripsi dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum, khususnya hukum acara peradilan agama.
- c. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis dalam mengungkapkan sesuatu keadaan secara sistematis dan konsisten.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian yang penulis lakukan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Penulis dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh secara teoritis selama di bangku kuliah dengan memanfaatkan dalam praktek kehidupan nyata.
- b. Penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan diperlukan pengumpulan data dari obyek yang dijadikan sasaran penelitian. Untuk mengumpulkan data tersebut diperlukan cara kerja yang merupakan metode penelitian. Yang dimaksudkan metode penelitian yaitu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian (research) adalah:

“Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.”⁴

Sehingga metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kekuatan suatu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto membagi penelitian berdasarkan sifatnya menjadi tiga macam, yaitu:

a. Penelitian Eksploratorik

Suatu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang hendak diselidiki ternyata masih kurang sekali atau bahkan tidak ada sama sekali.

⁴ Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Offset, Yogyakarta, 1993, hal. 4

b. Penelitian Deskriptif

Dimana suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.

c. Penelitian Eksplanatoris

Suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu yaitu hipotesa yang sudah mantap berdasarkan suatu kerangka pemilihan/teori yang sudah mantap pula.⁵

Berdasarkan atas pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan lengkap dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikannya, menganalisa serta menginterpretasikan data yang didapat guna memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan penelitian deskriptif ini penulis bermaksud untuk memberikan deskriptif tentang proses pelaksanaan pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama Klaten.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih Pengadilan Agama Klaten sebagai lokasi penelitian,

⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasih, Yogyakarta, hal. 13

karena di lokasi tersebut data-data dan bahan permasalahan yang sangat mendukung mudah diperoleh.

3. Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan hakim-hakim serta pegawai atau staf dari kantor Pengadilan Agama Klaten yang melakukan pemeriksaan dalam kasus pembatalan perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh melalui beberapa literatur, catatan berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, sehingga memberikan kemungkinan bagi penulis untuk mengadakan komunikasi langsung. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari hakim-hakim serta pegawai dan staf dari kantor Pengadilan Agama Klaten yang melakukan pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dengan jalan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku semua hal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah teknik analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah sebagai suatu atau cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁶

Sesuai dengan data yang diperoleh adalah data kualitatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dicari korelasinya dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulannya guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 1986, hal. 43.

deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengetahui keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka penulis uraikan secara singkat sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
 - 3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan
 - 4. Asas-asas Perkawinan

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Menurut Kompilasi

Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan
3. Rukun dan Syarat Perkawinan
4. Dasar-dasar Perkawinan

C. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun

1974

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
2. Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan
3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

D. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
2. Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan
3. Tata Cara Pembatalan Perkawinan
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan
2. Prosese-proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Klaten
3. Akibat Hukum yang Timbul dalam Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten
4. Landasan Hukum yang Dipakai dalam Pengambilan Putusan Perkara-perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten.
5. Permasalahan yang Timbul dalam Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan dan Penyelesaiannya.

B. PEMBAHASAN

1. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan
2. Prosese-proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Klaten
3. Akibat Hukum yang Timbul dalam Proses Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten
4. Landasan Hukum yang Dipakai dalam Pengambilan Putusan Perkara-perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klaten.

5. Permasalahan yang Timbul dalam Proses Pelaksanaan
Pembatalan Perkawinan dan Penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN